



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15185-15194

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pemberdayaan Perempuan melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja

Ni Nyoman Sariasih, Ni Nengah Karuniati, Cokorda Istri Mas Kusumaningrat

Prodi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Wira Bhakti

[niyomansariasih12@gmail.com](mailto:niyomansariasih12@gmail.com), [nengahkaruniati@gmail.com](mailto:nengahkaruniati@gmail.com), [cokistrimas89@gmail.com](mailto:cokistrimas89@gmail.com)\*

### Abstrak

*Pemberdayaan perempuan merupakan upaya strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan gender, khususnya bagi perempuan marginal yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, partisipasi, dan ruang pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan anggota Sekolah Perempuan, pendamping dari Bali Sruiti, serta perwakilan pemerintah desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan perempuan berlangsung melalui tiga tahapan, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Pada tahap penyadaran, perempuan mulai memahami pentingnya kesetaraan gender, hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta pentingnya keterlibatan dalam pembangunan desa. Pada tahap transformasi kemampuan, perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan advokasi, kepemimpinan, serta keberanian untuk berpartisipasi dalam forum publik. Selanjutnya, pada tahap peningkatan kemampuan, perempuan menunjukkan kemandirian melalui partisipasi aktif dalam pembangunan desa, pengelolaan kegiatan ekonomi seperti usaha kantin dan simpan pinjam, serta keterlibatan dalam advokasi komunitas. Program Sekolah Perempuan juga berkontribusi dalam memperkuat kapasitas organisasi perempuan di tingkat akar rumput. Namun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan, terutama terkait kemandirian kelembagaan setelah berakhirnya pendampingan, keterbatasan sumber daya, serta perlunya penguatan dukungan pemerintah desa agar program dapat berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang bagi pemberdayaan perempuan.*

*Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Sekolah Perempuan, Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Masyarakat, GEDSI*

### 1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam pembangunan manusia yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan keadilan sosial. Dalam proses pembangunan tersebut, keterlibatan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi faktor penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Perempuan sebagai bagian dari sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam pembangunan, sehingga tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan sosial, ekonomi, maupun politik (Sofiani, 2013: 64).

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia menempatkan pembangunan di berbagai sektor sebagai kebutuhan utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan harus direncanakan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, kondisi sosial demografis, geografis, ekonomi, politik, kesehatan, serta faktor budaya masyarakat. Perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi diharapkan mampu membawa masyarakat menuju kondisi kehidupan yang lebih baik (Iskandar dkk, 2016).

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai ketimpangan yang dialami oleh perempuan dalam kehidupan sosial. Fakih dalam Munthe dan Hafi, (2018: 61) menjelaskan bahwa ketidakadilan gender sering kali termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi, subordinasi, beban ganda, serta kekerasan terhadap perempuan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kuatnya budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat, terutama di wilayah pedesaan, yang memandang perempuan hanya berperan dalam ranah domestik. Akibatnya,

perempuan sering kali dianggap tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi ataupun mengembangkan potensi diri di luar peran rumah tangga.

Dalam struktur sosial yang patriarkal, perempuan cenderung berada pada posisi subordinat yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan. Penelitian Munthe dan Hafi (2018: 61) menunjukkan bahwa dominasi budaya patriarki menyebabkan perempuan lebih sering mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi tersebut merupakan hasil dari konstruksi sosial dan budaya yang terus berkembang dan membentuk norma-norma yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam struktur sosial. Fenomena ketertindasan perempuan bahkan telah tergambar dalam sejarah panjang peradaban manusia di berbagai belahan dunia (Nugroho, 2014: 41).

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan menjadi agenda penting dalam pembangunan global. Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan perempuan agar memiliki akses, kontrol, serta kesempatan yang lebih luas terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan (Hanindito, 2011:11). Dalam konteks tersebut, pendidikan menjadi salah satu instrumen penting dalam proses pemberdayaan. Haryanto (2008: 156) menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memberdayakan manusia, memampukan individu mengembangkan potensi yang dimiliki, serta meningkatkan kualitas hidup baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Isu pemberdayaan perempuan juga menjadi perhatian utama dalam agenda pembangunan internasional. Sejak dideklarasikannya Millennium Development Goals (MDGs) hingga berlanjut pada Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditempatkan sebagai prioritas pembangunan global. Tujuan kelima SDGs, yaitu Gender Equality, menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di ranah keluarga, sosial, ekonomi, maupun politik. Kesetaraan gender dipandang sebagai prasyarat utama bagi terciptanya pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (UNDP, 2016).

Di Indonesia sendiri, berbagai kebijakan telah dirumuskan untuk mendorong kesetaraan gender, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional. Melalui kebijakan tersebut diharapkan tercipta keadilan dan kesejahteraan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Meskipun demikian, perempuan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang kompleks. Budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat masih menempatkan perempuan pada posisi subordinasi (Suryakusuma, 2011). Hal ini berdampak pada terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan, kesempatan kerja yang layak, partisipasi politik, serta perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan. Data Komnas Perempuan (2022) menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender masih terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, partisipasi politik perempuan di lembaga legislatif juga masih belum mencapai target keterwakilan minimal 30% sebagaimana yang diharapkan (BPS, 2021).

Sebagai upaya memperkuat kesetaraan gender dan inklusi sosial, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Australia meluncurkan Program Kemitraan Indonesia–Australia untuk Inklusi (Program INKLUSI). Program ini merupakan program jangka panjang selama delapan tahun (2020–2028) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam proses pembangunan. Program INKLUSI berupaya memperluas akses kelompok marginal terhadap layanan dasar, perlindungan sosial, serta perlindungan dari kekerasan, sekaligus mendorong partisipasi yang lebih inklusif dalam proses pembangunan sosial, ekonomi, budaya, dan politik.

Dalam pelaksanaannya, Program INKLUSI bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia, salah satunya adalah Institut KAPAL Perempuan. Melalui analisis wilayah kerja, KAPAL Perempuan menetapkan sembilan provinsi sebagai wilayah intervensi program, termasuk Provinsi Bali. Salah satu tujuan utama program ini adalah mendorong terwujudnya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), yaitu desa yang menerapkan kebijakan serta sistem pemerintahan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta partisipasi masyarakat secara inklusif.

Untuk mewujudkan konsep DRPPA secara nyata, tidak cukup hanya melalui kebijakan formal di tingkat desa. Diperlukan pula upaya pengorganisasian masyarakat, khususnya kelompok perempuan akar rumput yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap ruang pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, Sekolah Perempuan hadir sebagai ruang pembelajaran komunitas yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk memahami hak-hak mereka, berbagi pengalaman, serta membangun solidaritas dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Septiani (2015: 68) menjelaskan bahwa Sekolah Perempuan merupakan bentuk pendidikan nonformal bagi perempuan akar rumput melalui proses pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan meningkatkan kemandirian serta kualitas hidup perempuan. Lebih lanjut, Misiyah dan Ulfa Kasim (2017:4) menyatakan bahwa Sekolah Perempuan bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kesadaran kritis, solidaritas, kecakapan hidup, serta komitmen untuk menjadi agen perubahan sosial di masyarakat.

Program Sekolah Perempuan telah dilaksanakan di sembilan provinsi di Indonesia, yaitu Bali, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Di Provinsi Bali, program ini dilaksanakan di Kota Denpasar, khususnya di tiga desa, yaitu Desa Dauh Puri Kaja, Desa Dauh Puri Kangin, dan Desa Dangin Puri Kangin.

Bali sebagai daerah dengan identitas budaya yang kuat juga menghadapi tantangan tersendiri dalam mewujudkan kesetaraan gender. Sistem sosial berbasis adat yang masih bersifat patriarkal sering kali membatasi ruang partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat (Robinson, 2008). Selain menjalankan peran domestik sebagai ibu dan istri, perempuan Bali juga memiliki tanggung jawab dalam aktivitas adat dan sosial kemasyarakatan, sehingga sering kali menghadapi beban ganda dalam kehidupan sehari-hari.

Desa Dauh Puri Kaja yang terletak di Kecamatan Denpasar Utara merupakan salah satu desa dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar tahun 2025 menunjukkan bahwa desa ini memiliki kepadatan penduduk sebesar 17.543 jiwa per kilometer persegi dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 9.560 jiwa dan perempuan sebanyak 9.562 jiwa. Sebagian besar wilayah desa ini merupakan kawasan pemukiman yang dihuni oleh masyarakat yang bekerja di sektor perdagangan dan usaha kecil, di mana perempuan memiliki peran yang cukup dominan dalam kegiatan ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, perempuan yang berada pada kelompok sosial dan ekonomi rentan sering kali belum sepenuhnya terakomodasi dalam berbagai program pembangunan desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung di tingkat desa belum sepenuhnya menjangkau kelompok perempuan marginal secara inklusif.

Dalam konteks inilah kehadiran Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja menjadi penting sebagai ruang pemberdayaan perempuan di tingkat akar rumput. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, serta kepemimpinan perempuan melalui berbagai kegiatan pembelajaran, advokasi, serta penguatan organisasi perempuan di tingkat komunitas. Melalui proses pembelajaran tersebut, perempuan diharapkan mampu menyalurkan aspirasi mereka serta berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program Sekolah Perempuan mampu meningkatkan kesadaran, kapasitas, serta partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi dalam proses pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas.

Atas dasar latar belakang tersebut, penulis menetapkan judul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Sekolah Perempuan di Desa Dauh Puri Kaja".

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, sebagai lokasi yang dipilih secara purposif karena menjadi salah satu wilayah pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Srikandi melalui Program INKLUSI. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi desa sebagai ruang implementasi pemberdayaan perempuan, khususnya bagi perempuan marginal, dalam memperkuat kesadaran kritis, keterampilan, partisipasi sosial, dan kepemimpinan perempuan di

tingkat desa. Selain itu, konteks sosial budaya yang masih dipengaruhi relasi patriarkal menjadikan lokasi ini strategis untuk menelaah kontribusi program terhadap penguatan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Penelitian menggunakan metode deskriptif karena berupaya menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai proses pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan, tanpa menguji hipotesis, sejalan dengan pandangan Nazir bahwa penelitian deskriptif berfokus pada penggambaran realitas empiris secara objektif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama serta analisis yang berorientasi pada pemaknaan, sebagaimana ditegaskan Sugiyono dan Moleong.

Subjek penelitian terdiri atas pendamping Sekolah Perempuan dari Bali Sruti, Pemerintah Desa Dauh Puri Kaja, dan anggota Sekolah Perempuan yang dipilih melalui teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan relevansi pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan dalam program agar data yang diperoleh mendalam dan sesuai fokus penelitian. Objek penelitian berfokus pada proses pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan. Data penelitian terdiri atas data kualitatif berupa narasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, serta data kuantitatif berupa jumlah peserta dan data pendukung lainnya. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, serta data sekunder berupa dokumen, arsip, struktur organisasi, dan dokumentasi program. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai key instrument, didukung pedoman wawancara, buku catatan, alat tulis, dan handphone untuk dokumentasi serta perekaman data lapangan, guna menjamin ketepatan dan kelengkapan informasi yang diperoleh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan perubahan yang dirasakan informan terkait proses pemberdayaan, sedangkan dokumentasi digunakan melengkapi dan memverifikasi data lapangan melalui foto kegiatan, arsip, dan rekaman. Analisis data menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, kemudian dipadukan dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Model ini digunakan secara berulang dan interaktif hingga diperoleh temuan yang kredibel dan komprehensif. Reduksi data dilakukan melalui pemilihan dan pemusatan informasi penting, penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif dan kategorisasi tematik, sedangkan tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan melalui verifikasi berkelanjutan terhadap konsistensi data lapangan. Kombinasi analisis tematik dan model Miles-Huberman dipilih karena dinilai mampu menghasilkan pemahaman mendalam mengenai dinamika pemberdayaan perempuan, perubahan kesadaran kritis, serta kontribusi program dalam mendorong inklusivitas pembangunan desa

### **3. Hasil dan Diskusi**

#### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dalam bab ini menjelaskan temuan-temuan lapangan terkait pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Srikandi sebagai upaya pemberdayaan perempuan di Desa Dauh Puri Kaja. Pemaparan hasil penelitian dilakukan secara sistematis berdasarkan kondisi kelembagaan, proses pendampingan, serta perubahan yang dialami oleh anggota Sekolah Perempuan.

Dalam penelitian ini, perubahan yang dialami anggota Sekolah Perempuan Srikandi dianalisis menggunakan teori tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Sulistyani (2004:83–84), yaitu: tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan.

#### **1. Tahap Penyadaran**

Tahap penyadaran merupakan tahap awal dalam pemberdayaan, yaitu upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat sadar dan peduli terhadap situasi yang dialaminya, sehingga muncul keinginan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kapasitas. Dalam konteks Sekolah Perempuan Srikandi, tahap ini diawali dengan persiapan program oleh Bali Sruti melalui survei, penggalan data, dan penentuan sasaran program.

Sasaran program Sekolah Perempuan diarahkan pada kelompok perempuan yang berada dalam kondisi rentan, yaitu perempuan dalam kondisi ekonomi lemah, perempuan kepala keluarga, perempuan disabilitas, perempuan penyintas kekerasan, dan perempuan lansia. Berdasarkan hasil pendataan bersama pemerintah desa, Bali Sruti

kemudian melakukan sosialisasi awal kepada perempuan-perempuan sasaran tersebut, sekaligus memperkenalkan isu kekerasan seksual dan pentingnya pendidikan kritis bagi perempuan.

Sebagaimana disampaikan oleh Sri Sulandari, staf Bali Sruti sekaligus pendamping Sekolah Perempuan, dalam wawancara tanggal 23 November 2025 pukul 18.00 WITA:

*“Kami dari tim Bali Sruti awalnya dulu melakukan sosialisasi sekolah perempuan kepada masyarakat. Tim Bali Sruti dengan pemerintah Desa Dauh Puri Kaja melihat data kategori yang diinginkan oleh Bali Sruti yakni perempuan dalam kondisi ekonomi lemah (miskin), perempuan kepala keluarga, perempuan disabilitas, perempuan penyintas kekerasan, dan perempuan lansia. Data tersebut ada di pemerintah desa, setelah melihatnya, Bali Sruti meminta untuk bisa melakukan sosialisasi tentang UU TPKS terlebih dahulu kepada orang-orang yang diberikan data oleh pemerintah desa ini. Nah, dari situ sudah terdata beberapa orang, kemudian dari situ mereka kami ajak untuk mengikuti pertemuan di Kantor Desa Dauh Puri Kaja. Karena tujuan dari GEDSI Watch ini adalah advokasi berbasis data maupun gender juga, jadi berdasarkan data pilah gender dengan menggunakan analisis gender, kita mengadvokasi para penerima manfaat program perlindungan sosial dengan cara meningkatkan kapasitas para perempuan penerima manfaat maupun yang seharusnya menerima bantuan perlindungan sosial dari pemerintah. Cara bagi perempuan untuk memantau program tersebut ialah kita membangun capacity building di dalam kelompok perempuan miskin. Caranya dengan pertama kali menyadarkan kelompok perempuan untuk menyadari hak-haknya, kemudian kita terapkan pelatihan-pelatihan kepada kelompok perempuan tersebut. Karena dengan menyadari mereka memiliki hak-hak tersebut maka mereka sendiri dapat memantau dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam dirinya sendiri.”*

Dari kutipan tersebut terlihat bahwa penyadaran dilakukan bukan hanya melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui proses identifikasi masalah, pembukaan ruang dialog, dan pembentukan kesadaran akan hak-hak perempuan. Sosialisasi menjadi pintu masuk penting dalam memperkenalkan bahwa pengalaman ketidakadilan yang selama ini dianggap biasa sesungguhnya merupakan bentuk penindasan yang dapat diubah.

Pada tahap awal pembelajaran, kegiatan dimulai dengan perkenalan, penggalan data pribadi, pengalaman hidup, serta penyusunan kesepakatan belajar. Langkah ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman agar anggota berani terbuka. Perempuan diminta menceritakan latar belakang pendidikan, usia menikah, pekerjaan, serta persoalan yang dialami. Dari proses awal ini teridentifikasi berbagai persoalan seperti putus sekolah, perkawinan anak, tidak pernah terlibat di ruang publik, beban ganda, hingga pengalaman kekerasan.

Hal tersebut sejalan dengan pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Kerti, anggota Sekolah Perempuan, dalam wawancara tanggal 5 Desember 2025 pukul 17.00 WITA:

*“Pertama kali pertemuan itu kalau tidak salah untuk melakukan perkenalan. Setelah perkenalan, saya ditanyai umur berapa dan usia menikah waktu itu umur berapa. Kemudian ditanyai lulusan apa pendidikannya, serta ditanyai pekerjaan sehari-harinya apa. Saya juga diminta untuk menceritakan pengalaman hidup saya dan sebelum pertemuan berakhir kami membuat perjanjian belajar dilakukan di mana dan kapan waktunya. Pada pertama kali itu saya merasa sangat takut sekali memegang mic yang disodorkan kepada saya, saya terbata-bata menyampaikan, namun terus didukung oleh Bali Sruti untuk tidak apa-apa bicara saja, tidak ada salah dan benar katanya.”*

Setelah itu dilakukan pemetaan partisipatif, di mana perempuan menuliskan identitas, tingkat pendapatan, dan persoalan yang mereka alami pada kertas plano, lalu mendiskusikannya bersama. Metode ini penting karena memberi ruang bagi perempuan untuk melihat bahwa masalah pribadi mereka sesungguhnya terkait dengan struktur sosial yang lebih luas.

Ditinjau dari teori Sulistyani, tahap penyadaran dalam Sekolah Perempuan Srikandi telah berjalan dengan baik. Bali Sruti telah menyiapkan sasaran program secara jelas, membangun prakondisi yang mendukung, menyediakan fasilitas pertemuan, dan memulai pembelajaran dengan pendekatan yang mampu membuka kesadaran perempuan. Namun demikian, proses ini tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Pada awal pelaksanaan, masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat yang memandang Sekolah Perempuan secara negatif.

Sebagaimana disampaikan oleh Novita, anggota Sekolah Perempuan, dalam wawancara tanggal 8 Desember 2025 pukul 16.24 WITA:

*“Awalnya masyarakat sini tidak suka mbak, banyak sekali penolakan waktu saya door to door mengajak ibu-ibu disini untuk ikut sekolah perempuan mereka menolak, belum lagi omongan orang-orang yang bilang kalau sekolah perempuan itu mengajarkan perempuan atau istri-istri berani kepada suami. Tapi mbak sekarang masyarakat sini mulai sadar dan mereka justru berterima kasih pada kami sekolah perempuan karena banyak membantu masyarakat dengan adanya pos pengaduan sekolah perempuan dan membuat banyak perubahan.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa dalam tahap kesadaran terdapat tantangan budaya, terutama stereotip patriarkal yang memandang pemberdayaan perempuan sebagai ancaman bagi relasi rumah tangga. Namun, konsistensi sosialisasi dan pendekatan tanpa paksaan akhirnya mampu mengubah persepsi masyarakat secara perlahan.

## **2. Tahap Transformasi kemampuan**

Tahap transformasi kemampuan merupakan tahap ketika masyarakat mulai memperoleh pengetahuan, wawasan, dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan hidupnya. Pada tahap ini, perempuan tidak lagi hanya sadar terhadap masalah, tetapi mulai dibekali pengetahuan dan kecakapan untuk merespons persoalan tersebut.

Dalam Sekolah Perempuan Srikandi, transformasi kemampuan dilakukan melalui Pendidikan Adil Gender. Materi yang diberikan mencakup pendidikan gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, kepemimpinan perempuan, membangun organisasi, perlindungan sosial, perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, UU TPKS, hingga pendidikan politik. Selain itu, Sekolah Perempuan juga mengembangkan pos pengaduan untuk membantu warga marginal dalam pengurusan identitas hukum, perlindungan sosial, dan penanganan kasus kekerasan.

Proses pembelajaran menggunakan metode partisipatif, yaitu dialog dua arah, diskusi kelompok, bermain peran, analisis kasus, analisis film, silsilah keluarga, menggambar, diorama, dan metode meraba tubuh untuk materi kesehatan reproduksi. Pendekatan ini dipilih karena pengalaman hidup perempuan menjadi sumber utama pembelajaran, sehingga perempuan lebih mudah merasa dekat dengan materi dan berani menyampaikan pengalaman hidupnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kerti:

*“Proses pembelajaran pertama kali yaitu datang ke tempat sekolah perempuan, kemudian absen, duduk melingkar, setelah itu fasilitator menerangkan materi, lalu kami mendengarkan, setelah penjelasan dari fasilitator kami diajak untuk berdiskusi materi yang telah disampaikan. Materi yang sering disampaikan adalah penjelasan tentang UU TPKS, perlindungan sosial kesehatan seperti JKN KIS PBI, materi perlindungan anak, perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, pendidikan adil gender, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, serta kepemimpinan perempuan.”*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap transformasi kemampuan telah menghasilkan perubahan pengetahuan dan cara pandang anggota. Perempuan mulai memahami perbedaan antara sex dan gender, mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan gender, serta melihat bahwa pembagian kerja rumah tangga yang timpang bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja.

Hal ini tampak dari pernyataan Ibu Ida Faridah dalam wawancara tanggal 18 Desember 2025 pukul 16.08 WITA:

*“Kami belajar seks dan gender mbak, jadi kalau seks itu ya jenis kelamin, jadi yang membedakan laki-laki dan perempuan itu jenis kelamin ya itu disebut seks. Kalau gender itu semacam sifat dan peran yang membedakan laki-laki dan perempuan. Nah, dari situ mbak yang tidak kami sadari para perempuan seperti kami ini. Selama ini kami tidak mengerti yang kami tahu ya perempuan itu di rumah aja, masak, nyuci, nyapu, semua pekerjaan rumah dikerjakan perempuan, laki-laki ya kerja, pulang kerja lagi, sudah. Jadi laki-laki gak mau tahu urusan rumah mbak, kan jadinya kita yang capek sendiri lama-lama.”*

Selain pengetahuan gender, peningkatan juga terlihat dalam kesadaran kesehatan reproduksi. Berdasarkan data PRA Desa Dauh Puri Kaja tahun 2022, banyak perempuan mengalami masalah reproduksi seperti keputihan dan kista, tetapi tidak menyadari risikonya karena minim pengetahuan. Menurut Novita, banyak perempuan sebelumnya menganggap keputihan sebagai hal biasa, padahal bisa menjadi indikasi gangguan kesehatan reproduksi. Setelah mengikuti pembelajaran, perempuan mulai rutin memeriksakan kesehatan reproduksi di puskesmas dan lebih terbuka membicarakan isu tubuhnya sendiri.

Dengan demikian, jika dilihat dari teori Sulistyani, tahap transformasi kemampuan dalam Sekolah Perempuan Srikandi telah terlaksana dengan baik. Perempuan tidak hanya menjadi penerima materi, tetapi mulai memiliki pemahaman kritis dan kemampuan awal untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### 3. Tahap Peningkatan Kemampuan

Tahap peningkatan kemampuan merupakan tahap pengayaan, yaitu tahap ketika perempuan telah memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk bertindak, berinisiatif, menciptakan inovasi, dan mengambil peran sebagai subjek pembangunan. Dalam Sekolah Perempuan Srikandi, tahap ini tampak dari meningkatnya keberanian perempuan bersuara, keterlibatan dalam forum desa, kemampuan mendampingi masyarakat, serta tumbuhnya inisiatif ekonomi kelompok.

Salah satu bentuk peningkatan kemampuan adalah pembentukan tim pos pengaduan. Tim ini dipilih dari anggota yang memiliki penguasaan materi dan pemahaman terhadap persoalan kekerasan, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Anggota tim kemudian mendapatkan pelatihan lanjutan mengenai penanganan kasus dan pendampingan korban berperspektif gender.

Pos pengaduan berkembang menjadi salah satu ciri penting Sekolah Perempuan Srikandi. Menurut wawancara dengan Sri Sulandari pada 23 November 2025 pukul 18.00 WITA, perkembangan Sekolah Perempuan saat ini cukup signifikan. Sekolah Perempuan telah dikenal oleh banyak pihak, termasuk pemerintah daerah seperti DP3AP2KB, UPTD PPA, dan Dinas Dukcapil. Selain itu, Sekolah Perempuan juga semakin sering melakukan siaran di RRI Denpasar, usaha kelompok Kantin Srikandi berkembang, anggota semakin berani bersuara, dan jumlah pengaduan di pos pengaduan terus meningkat. Hingga akhir tahun 2025, total pengaduan yang masuk sejak 2023 mencapai 371 pengaduan, dengan jumlah terbanyak berkaitan dengan identitas hukum.

Temuan ini menunjukkan bahwa Sekolah Perempuan telah bergerak dari ruang belajar internal menjadi aktor komunitas yang diakui publik. Pos pengaduan bukan hanya memberi manfaat bagi anggota, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Peningkatan kemampuan juga terlihat dalam keterlibatan anggota pada forum perencanaan pembangunan desa, khususnya Musyawarah Desa (Musdes) dan Musrenbangdes. Sekolah Perempuan pertama kali mengikuti musyawarah perencanaan pada 27 Mei 2023. Dalam forum tersebut, anggota mulai berani menyampaikan usulan yang berperspektif gender, seperti pelatihan kepemimpinan perempuan, fasilitas pos pengaduan, dan bantuan pendidikan bagi anak-anak perempuan kepala keluarga. Data partisipasi ini juga selaras dengan catatan internal bahwa Sekolah Perempuan Dauh Puri Kaja mulai mengusulkan kebutuhan mereka dalam forum desa pada 2023, dan sebagian usulan direalisasikan pada 2024–2025.

Sebagaimana disampaikan Ibu Radiah dalam wawancara tanggal 23 Desember 2025 pukul 17.39 WITA::

*“Sekolah perempuan sudah punya usulan yang telah diketahui oleh pemerintah desa, tetapi usulan tersebut harus melalui musrenbang desa agar dapat direalisasikan. Usulan yang akan disampaikan sekolah perempuan harus berperspektif gender, antara lain pelatihan kapasitas kepemimpinan perempuan, ruang dan sarana operasional pos pengaduan, serta bantuan beasiswa bagi anak-anak perempuan kepala keluarga yang kategori miskin. Ternyata dengan berlatih menghafal di rumah dan membawa catatan, akhirnya kelima orang pengurus Sekolah Perempuan Srikandi bisa menyampaikan pendapatnya di forum desa.”*

Partisipasi dalam Musdes dan Musrenbangdes menunjukkan peningkatan signifikan pada kapasitas intelektual dan keberanian anggota. Perempuan yang sebelumnya tidak pernah berbicara di forum publik kini mampu menyusun usulan, menyuarakan kepentingan kelompok rentan, dan mengawal usulan hingga ke tahap verifikasi anggaran.

Dari sisi kepercayaan diri, perubahan juga sangat terasa. Banyak anggota yang pada awalnya takut memegang mikrofon, kini sudah terbiasa berbicara di depan umum, baik dalam pertemuan Sekolah Perempuan, forum desa, maupun undangan pihak lain. Dengan kata lain, peningkatan kemampuan tidak hanya terjadi pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada aspek kepemimpinan, komunikasi, dan posisi sosial di masyarakat.

Hal ini tercermin dari pernyataan Ibu Ida Faridah, anggota tim pos pengaduan, dalam wawancara tanggal 18 Desember 2025 pukul 16.30 WITA:

*“Dampak positif yang saya rasakan adalah dulu saya tidak dianggap, saya bukan siapa-siapa, tapi sekarang jadi banyak yang minta tolong saya untuk mengurus surat-surat penting seperti akta kelahiran, KK, BPJS maupun yang lain. Selain itu banyak sekali pengalaman yang saya miliki.”*

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perubahan posisi sosial anggota. Perempuan yang sebelumnya termarginalkan kini dipandang sebagai sosok yang mampu membantu masyarakat. Ini menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan tidak berhenti pada level individu, tetapi telah memberi pengaruh pada relasi sosial di tingkat komunitas.

Selain penguatan advokasi dan kepemimpinan, peningkatan kemampuan juga terlihat pada upaya penguatan ekonomi kolektif. Dalam wawancara dengan I Gusti Ketut Sucipta, Kepala Desa Dauh Puri Kaja, pada tanggal 28 Desember 2025 pukul 13.00 WITA, dinyatakan bahwa pemerintah desa sangat mendukung Sekolah Perempuan karena dianggap telah memberi kontribusi bagi kemajuan desa. Pemerintah desa memfasilitasi ruang pertemuan, transportasi berupa mobil terbuka bila kegiatan menjangkau lokasi yang jauh, serta ruang untuk pos pengaduan. Namun, beliau juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa dukungan politik desa dapat berubah jika terjadi pergantian kepemimpinan desa. Karena itu, Sekolah Perempuan didorong untuk semakin mandiri, terutama melalui pengembangan Kantin Srikandi dan kelompok simpan pinjam yang ke depan diharapkan berkembang menjadi koperasi.

Pernyataan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa keberlanjutan Sekolah Perempuan tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan kemampuan ekonomi kelompok. Hal ini juga sejalan dengan dokumen pembelajaran program KAPAL Perempuan yang menekankan manfaat ekonomi sebagai penopang kemandirian perempuan dan keberlanjutan gerakan Sekolah Perempuan.

## **Pembahasan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan melalui Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja berlangsung secara bertahap dan sesuai dengan tahapan pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Sulistyani, yaitu kesadaran, transformasi kemampuan, dan peningkatan kemampuan. Pada tahap kesadaran, Bali Sruti berhasil membuka ruang kritis bagi perempuan untuk mengenali pengalaman ketidakadilan yang selama ini dinormalisasi oleh budaya patriarki. Pada tahap ini, perempuan mulai memahami bahwa beban ganda, tidak dilibatkannya mereka dalam ruang publik, hingga pengalaman kekerasan bukanlah takdir, melainkan persoalan sosial yang dapat diubah.

Tahap transformasi kemampuan memperlihatkan bagaimana Sekolah Perempuan berfungsi sebagai ruang pendidikan nonformal yang relevan dengan kebutuhan nyata perempuan marginal. Materi pembelajaran yang diberikan tidak berhenti pada pengetahuan abstrak, tetapi terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari, seperti gender, kesehatan reproduksi, perlindungan sosial, perlindungan anak, kekerasan, dan kepemimpinan perempuan. Pendekatan partisipatif yang digunakan memungkinkan perempuan belajar dari pengalaman hidupnya sendiri, sehingga pembelajaran lebih bermakna dan kontekstual.

Adapun tahap peningkatan kemampuan menunjukkan perubahan yang lebih substantif. Perempuan tidak hanya menjadi lebih paham, tetapi juga lebih berani, lebih percaya diri, dan lebih terlibat dalam kehidupan publik. Mereka mulai berani berbicara di forum desa, mengusulkan program yang berperspektif gender, membantu warga mengurus identitas hukum, mendampingi pengaduan, serta mengembangkan usaha ekonomi kelompok. Dengan demikian, Sekolah Perempuan telah mengubah perempuan dari posisi objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan Sekolah Perempuan tidak hanya ditentukan oleh kualitas modul dan pendampingan, tetapi juga oleh dukungan ekosistem kelembagaan. Dukungan pemerintah desa, ruang pos pengaduan, pengakuan dari OPD daerah, dan jejaring layanan merupakan faktor penting yang memperkuat posisi Sekolah Perempuan. Namun demikian, keberlanjutan program masih menghadapi tantangan, terutama karena pendampingan Bali Sruti dan dukungan Program INKLUSI bersifat terbatas hingga 2028. Kekhawatiran yang muncul dari pendamping dan pemerintah desa menunjukkan bahwa tanpa strategi kemandirian, organisasi berpotensi melemah ketika dukungan anggaran, konsumsi, dan transportasi tidak lagi tersedia.

Oleh karena itu, dari perspektif pemberdayaan, fase berikutnya yang sangat penting adalah penguatan keberlanjutan kelembagaan. Sekolah Perempuan perlu memperkuat basis ekonomi kolektif seperti Kantin Srikandi dan simpan pinjam, meningkatkan legalitas dan tata kelola organisasi, memperluas kaderisasi kepemimpinan, serta membangun mekanisme dukungan lintas desa dan lintas lembaga. Dengan demikian, Sekolah Perempuan dapat tetap hidup bukan hanya karena adanya pendamping, tetapi karena telah memiliki kapasitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk bertahan secara mandiri.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberdayaan perempuan melalui Program Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja, dapat disimpulkan bahwa proses pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui Sekolah Perempuan telah berjalan melalui tahapan pemberdayaan sebagaimana dikemukakan oleh Sulistyani, yaitu tahap penyadaran, tahap transformasi kemampuan, dan tahap peningkatan kemampuan. Pada tahap penyadaran, Bali Sruti bersama pemerintah Desa Dauh Puri Kaja melakukan proses sosialisasi dan penggalian data terhadap perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan seperti perempuan miskin, perempuan kepala keluarga, perempuan disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan penyintas kekerasan. Melalui kegiatan sosialisasi, diskusi, serta pemetaan partisipatif, perempuan mulai memahami kondisi ketidakadilan gender yang dialami serta menyadari pentingnya peningkatan kapasitas diri melalui Sekolah Perempuan. Selanjutnya pada tahap transformasi kemampuan, anggota Sekolah Perempuan memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui proses pendidikan nonformal yang meliputi materi pendidikan adil gender, seksualitas dan kesehatan reproduksi, kepemimpinan perempuan, membangun organisasi, serta perlindungan sosial. Proses pembelajaran dilakukan secara partisipatif dengan metode diskusi, analisis pengalaman hidup, permainan edukatif, serta berbagai metode pembelajaran yang memungkinkan perempuan lebih terbuka dalam mengungkapkan pengalaman hidupnya. Tahap peningkatan kemampuan terlihat dari meningkatnya kapasitas perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Anggota Sekolah Perempuan berani berbicara di ruang publik, terlibat dalam musyawarah desa, menyampaikan aspirasi pembangunan yang berperspektif gender, serta berperan dalam pengelolaan pos pengaduan yang membantu masyarakat dalam mengurus identitas hukum, jaminan sosial, serta penanganan kasus kekerasan. Selain itu, perempuan juga mulai mengembangkan kegiatan ekonomi kelompok seperti usaha Kantin Srikandi serta kegiatan simpan pinjam yang berpotensi berkembang menjadi koperasi perempuan. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat tantangan dalam keberlanjutan program Sekolah Perempuan di masa mendatang. Program Sekolah Perempuan selama ini banyak didukung oleh pendampingan dari Bali Sruti melalui program INKLUSI, yang menurut perjanjian kerja sama akan berakhir pada tahun 2028. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran apabila pendampingan telah berakhir, sementara Sekolah Perempuan belum memiliki sumber daya dan dukungan pendanaan yang cukup untuk menjalankan kegiatan secara mandiri. Selain itu, keberlanjutan dukungan dari pemerintah desa juga dipengaruhi oleh dinamika kepemimpinan desa, mengingat pergantian kepala desa berpotensi mempengaruhi keberpihakan kebijakan terhadap program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, meskipun Sekolah Perempuan Srikandi telah menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan kapasitas, kesadaran, dan partisipasi perempuan di Desa Dauh Puri Kaja, upaya penguatan kelembagaan, kemandirian organisasi, serta keberlanjutan program menjadi tantangan penting yang perlu diperhatikan agar Sekolah Perempuan tetap dapat berkembang dan berfungsi sebagai ruang belajar serta pengorganisasian perempuan di tingkat komunitas.

#### Referensi

1. Abbasy, Khabib. (2021). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Batik Tulis. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Andriani. (2021) "Pemberdayaan Perempuan dalam Pemanfaatan Limbah Bekas Tali Kapal," *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), pp. 75–85. Available at: <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.585>.
3. Aloia, Pasquale dan Aloia. 2011. Pengertian Pola Pikir Menurut Para Ahli. <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2014-1-00714-PS%20Bab2001.pdf>
4. Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
5. Badan Pusat Statistik Kota Denpasar. (2025). *Kota Denpasar dalam Angka 2025*. Denpasar: BPS Kota Denpasar
6. Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik politik: Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 2021*. Jakarta: BPS.
7. Budianta, M. (2018). *Gender dan transformasi sosial di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
8. Eko, Sudarmanto, dkk. 2014. "Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan dan Pemberdayaan". Medan : Yayasan Kita Menulis.
9. Fang, C., Lundgren, K., Chen, L., & Zhu, C. (2004). Corrosion influence on bond in reinforced concrete. *Cement dan concrete research*, 34(11), 2159-2167.
10. Hamilton, R., Vohs, K. D., Sellier, A.-L., & Meyvis, T. (2011). Being of two minds: Switching mindsets exhausts self-regulatory resources. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 115(1), hlm. 13–24.
11. Hanindito, Andi. 2011. *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

12. Haryanto, R. (2008) "Rehabilitasi Hutan Mangrove : Pelestarian Ekosistem Pesisir Pantai dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir," *Karsa*, 14(2), pp. 148–160.
13. Heeks, R., Foster, C. and Nugroho, Y. (2014) "New models of inclusive innovation for development," *Innovation and Development*, 4(2), pp. 175–185. Available at: <https://doi.org/10.1080/2157930x.2014.928982>.
14. Heriyanto, P. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk. *Anuva*, 2(3), 317–324.
15. Iskandar, D.T., Sumartono, S. and Domai, T. (2016) "Evaluasi Program Pembinaan Dan Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo," *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(1), p. 17. Available at: <https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n1.p17-22>.
16. KAPAL Perempuan. (2020). Modul Sekolah Perempuan: Pendidikan kritis gender dan advokasi berbasis GEDSI. Jakarta: Yayasan KAPAL Perempuan.
17. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Panduan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Jakarta: KemenPPPA RI.
18. Komnas Perempuan. (2022). Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2022. Jakarta: Komnas Perempuan.
19. Mardikanto, T., & Poerwoko Soebiato, H. (2017). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
20. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
21. Misiyah, & Kasim, U. (2017). *Sekolah Perempuan: Mengembangkan Kesadaran Kritis dan Kepemimpinan Perempuan*. Jakarta: Institut KAPAL Perempuan.
22. Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
23. Munthe, H.M. and Hafi, B. (2018) "Pemberdayaan Gender Pada Tokoh Adat Untuk Mendukung Peran Perempuan Dalam Pembangunan Desa," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), pp. 60–65. Available at: <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.14>.
24. Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. (2005). *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
25. Nazir, M. (2013). *Metode penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
26. Robinson, K. (2008) *Gender, Islam and democracy in Indonesia, Gender, Islam and Democracy in Indonesia*. Available at: <https://doi.org/10.4324/9780203891759>.
27. Septiani, M. (2015) "Pengalaman Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Pkbm) Dalam Memfasilitasi Masyarakat Belajar Sepanjang Hayat," *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 10(2), pp. 67–76. Available at: <https://doi.org/10.21009/jiv.1002.1>.
28. Sofiani, T. (2013) "Membuka Ruang Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan," *Muwazah*, 1(1). Available at: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i1.280>.
29. Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
30. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
31. Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
32. Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
33. Sulistiyani, T. A. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Pustaka Pelajar.
34. Suryakusuma, J. I. (2011). *Sex, power and nation*. Jakarta: Komunitas Bambu.
35. United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016: Human development for everyone*. New York: UNDP.
36. United Nations Development Programme. (2016). *Human Development Report 2016: Human development for everyone*. New York: UNDP.